

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Tantangan Pemerintah Dalam Mewujudkan Integrasi Nasional Di Era Modern

Adelia Anastasya¹, Maulidiana², Miftahul Makwa³, Fira Salsabila Limba⁴.

¹Universitas Mataram, NTB, Indonesia, adeliaaanastasyaa@gmail.com

²Universitas Mataram, NTB, Indonesia, Maulidianaqolbi@gmail.com

³Universitas Mataram, NTB, Indonesia, makwamiftahul@gmail.com

⁴Universitas Mataram, NTB, Indonesia, firaasalsaa334@gmail.com

Abstrak: Integrasi nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas suatu negara, terutama di tengah dinamika era modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya kesadaran identitas lokal. Tujuan dari artikel ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga dan mewujudkan integrasi nasional di tengah kondisi sosial-politik yang kompleks. Beberapa tantangan utama meliputi meningkatnya polarisasi politik, penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian melalui media digital, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah yang memicu sentimen kedaerahan. Di samping itu, pemerintah juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kepentingan menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, artikel ini menganalisis peran strategis pemerintah dalam membangun komunikasi yang inklusif, memperkuat pendidikan kebangsaan, serta merumuskan kebijakan desentralisasi yang adil dan berkelanjutan. Temuan dalam artikel ini adalah konflik social berbasis SARA, menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian, ketimpangan pembangunan dan kesenjangan social ekonomi, penanggulangan separatisme dan radikalisme, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Kata Kunci: : *Integrasi Nasional, Pemerintah, Tantangan, Era Modern, Kebijakan Publik, Disintegrasi Sosial.*

*Correspondence Address: Maulidianaqolbi@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini di satu sisi menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga menyimpan potensi konflik dan disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik. Sejak awal kemerdekaan, upaya untuk menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan nasional telah menjadi tantangan besar. Konsep integrasi nasional menjadi sangat penting dalam konteks ini, yakni sebagai suatu proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada demi tercapainya keselarasan, persatuan, dan stabilitas nasional.

Namun, tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional tidak bersifat statis. Dalam era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, globalisasi, serta perubahan sosial dan politik yang cepat, tantangan tersebut semakin kompleks. Kemajuan

teknologi informasi, misalnya, telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara instan dan masif. Di satu sisi, hal ini membuka peluang baru untuk mempererat komunikasi dan memperkuat kesadaran kebangsaan. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga memperbesar potensi penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan konten yang memecah belah masyarakat. Polarisasi politik yang mengeras, terutama pasca pemilihan umum, semakin memperburuk kondisi kohesi sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, lemahnya distribusi keadilan sosial, serta belum meratanya akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik turut menjadi faktor-faktor struktural yang menghambat terwujudnya integrasi nasional. Dalam kondisi seperti ini, munculnya sentimen kedaerahan, gerakan separatisme, serta radikalisme berbasis agama dan ideologi menjadi tantangan nyata bagi pemerintah. Di tengah tekanan global dan lokal tersebut, negara dituntut untuk lebih adaptif dalam merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah sebagai pemegang otoritas negara memiliki peran sentral dalam menjaga dan mengarahkan proses integrasi nasional. Kebijakan publik yang inklusif, penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan, serta penegakan hukum yang adil menjadi elemen penting dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara. Namun, peran ini tidak selalu berjalan efektif, terutama jika tidak diiringi oleh pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berbasis pada pemahaman terhadap realitas sosial yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjaga dan mewujudkan integrasi nasional di era modern. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan strategis yang dapat digunakan pemerintah guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah era yang sarat perubahan dan ketidakpastian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya penguatan integrasi nasional secara berkelanjutan.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Menurut (Ardiansyah.,dkk.2025) bahwa metode studi literatur adalah cara meneliti yang menggunakan referensi atau rujukan terancang secara ilmiah yang meliputi mengumpulkan bahan referensi yang berhubungan dengan tujuan penelitian, Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan mengintegrasikan serta menyajikan data.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah dan mengkaji berbagai konsep, teori, dan kerangka pemikiran yang relevan, seperti teori integrasi sosial, nasionalisme, serta teori ketahanan nasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memperkuat integrasi nasional. Fokus kajian mencakup bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kohesi sosial dan keutuhan bangsa di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

- a. Tantangan Utama Pemerintah dalam Menjaga dan Mewujudkan Integrasi Nasional di Era Modern

Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural menghadapi

tantangan serius dalam mewujudkan dan menjaga integrasi nasional. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di satu sisi merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain menjadi potensi konflik jika tidak dikelola secara bijak. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring perkembangan zaman, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang kebijakan strategis, edukatif, dan preventif untuk menjaga persatuan bangsa.

1. Konflik Sosial Berbasis SARA

Konflik horizontal berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan integrasi nasional. Meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade, konflik yang melibatkan identitas kelompok masih sering terjadi. Konflik ini mencerminkan lemahnya pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan, serta kurangnya ruang dialog dan rekonsiliasi antarkelompok masyarakat. Beberapa insiden bahkan dipicu oleh provokasi media sosial atau sentimen politik yang sengaja dibesar-besarkan.

Sebagai respons terhadap potensi disintegrasi akibat konflik SARA, pemerintah membentuk lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta memperkuat pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Upaya ini dimaksudkan untuk membentuk karakter generasi muda yang inklusif dan toleran. Seperti disampaikan oleh (Agus, 2016), integrasi nasional menjadi parameter penting dalam menjaga kesatuan bangsa Indonesia di tengah pluralitas sosial. Artinya, pemerintah tidak cukup hanya dengan menindak pelanggaran, tetapi juga harus mendorong pemahaman lintas budaya sejak dini melalui pendidikan dan partisipasi komunitas.

2. Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru dalam komunikasi publik, yaitu media sosial. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi tempat subur bagi penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena menyasar kelompok usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa, yang belum memiliki literasi digital memadai. Menurut (Thulhidjah, 2022), penyebaran hoaks di Instagram sangat rentan terjadi di kalangan remaja karena lemahnya pemahaman terhadap literasi media dan minimnya verifikasi informasi. Ia menyatakan bahwa "remaja sering kali menjadi sasaran empuk propaganda karena hanya membaca judul dan tidak memverifikasi kebenaran konten. (Yani, 2020) juga menambahkan bahwa hoaks dapat mengganggu keharmonisan sosial apabila tidak dicegah secara sistematis." Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pun gencar mengampanyekan literasi digital dan membentuk satuan siber untuk mendeteksi konten negatif. (Akhyar et al, 2024) menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengelola keberagaman masyarakat, termasuk dengan memperketat pengawasan terhadap media daring.

3. Ketimpangan Pembangunan dan Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Salah satu penyebab utama munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Akibatnya, masyarakat di daerah tertinggal merasa dianaktirikan dan mulai mempertanyakan keadilan

sosial yang seharusnya dijamin oleh negara.

Pemerintah melalui berbagai program seperti Dana Desa, pembangunan kawasan perbatasan, dan proyek strategis nasional telah berupaya mengatasi kesenjangan ini. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi tantangan tersendiri. Universitas Lampung (n.d.) menekankan bahwa “pemerataan pembangunan merupakan kewajiban struktural pemerintah yang tidak bisa ditunda jika ingin menjaga stabilitas nasional.” Ketika rasa keadilan tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin akan muncul sentimen kedaerahan yang berpotensi merusak integrasi nasional. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh bersifat simbolis, melainkan menyentuh kebutuhan riil masyarakat lokal.

4. Erosi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme

Globalisasi dan keterbukaan informasi membuat generasi muda lebih akrab dengan budaya luar ketimbang budaya nasional. Banyak dari mereka yang mengadopsi nilai-nilai liberalisme dan individualisme tanpa filter, sehingga mengurangi kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan. Kondisi ini diperparah dengan

menurunnya kualitas pendidikan karakter di sekolah dan kurangnya keteladanan dari tokoh publik.

(Irhandyaningsih, 2012) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental dalam menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, namun peran tersebut akan memudar jika tidak ditanamkan secara sistematis. Sementara itu, (Asyahidah & Dewi, 2022) menyarankan agar nilai-nilai kebangsaan diajarkan secara kontekstual sesuai zaman, sehingga generasi muda tidak merasa asing dengan identitas nasionalnya. Pemerintah melalui kurikulum merdeka belajar telah mencoba menyisipkan kembali materi tentang kewarganegaraan, Pancasila, dan pendidikan karakter. Namun keberhasilan program ini sangat tergantung pada konsistensi implementasi di lapangan.

5. Ancaman Separatisme dan Radikalisme

Separatisme dan radikalisme adalah dua ancaman nyata yang berpotensi menghancurkan keutuhan NKRI. Radikalisme biasanya tumbuh subur di kalangan masyarakat yang merasa termarginalkan atau kecewa terhadap sistem pemerintahan. Sementara itu, separatisme sering kali berakar pada sejarah konflik berkepanjangan dan ketimpangan ekonomi yang belum tuntas ditangani.

Pendekatan pemerintah terhadap dua ancaman ini tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer atau represif. Melainkan, pendekatan dialogis, kesejahteraan, dan pembangunan wilayah menjadi bagian dari strategi yang lebih menyeluruh. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (n.d.) menyatakan bahwa “kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial serta meredam potensi konflik yang berakar pada ketidakpuasan terhadap sistem.” Program deradikalisasi yang menyasar mantan narapidana terorisme, serta upaya pembangunan di Papua dan wilayah perbatasan adalah contoh konkret dari pendekatan holistik yang dijalankan pemerintah.

B. Pendekatan Strategis untuk Memperkuat Integrasi Nasional di Era Globalisasi dan Digital

Pendekatan atau kebijakan strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional adalah dengan mengintegrasikan teknologi

informasi dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Integrasi ini sangat relevan di era multikulturalisme dan globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia. Salah satu strategi utama adalah dengan memanfaatkan media digital untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara menarik, interaktif, dan kontekstual.

Santoso dan (Soesanto, 2024) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan Pancasila dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran, serta mendukung penyebaran nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, dan keadilan sosial melalui media digital. Hal ini sangat penting dalam memperkuat kesadaran multikulturalisme dan mencegah konflik sosial yang dapat mengancam integrasi nasional. Dalam konteks pendidikan, teknologi juga membuka ruang kolaborasi antarsiswa dari berbagai latar belakang untuk saling memahami dan menghargai perbedaan.

Kebijakan strategis lain yang direkomendasikan oleh Alpata, Rahmadan, dan (Zainuri, 2024) adalah penerapan model *blended learning* dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terintegrasi dengan kurikulum nasional. Model ini memadukan pembelajaran tatap muka dan digital, sehingga memperkuat kompetensi abad ke-21 tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan agama yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman dapat menjadi kekuatan kultural dalam memperkuat identitas nasional.

Selain itu, Sakhi dan (Najicha, 2023) menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam kampanye digital kebangsaan, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila, serta penguatan komunitas digital yang menyuarakan semangat persatuan. Dengan membangun karakter dan ideologi kebangsaan sejak dini, generasi muda akan lebih siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa.

(Suheri dkk, 2022) menambahkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana strategis untuk menyebarkan semangat nasionalisme apabila dimanfaatkan secara bijak dan edukatif. Pemerintah dan pendidik perlu mengarahkan narasi di media sosial agar lebih berfokus pada konten kebangsaan, sejarah, dan budaya lokal yang memperkuat identitas Indonesia.

Dengan demikian, strategi untuk memperkuat integrasi nasional harus menyentuh tiga aspek utama: inovasi kurikulum yang berbasis digital dan nilai, pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan, dan optimalisasi media sosial sebagai sarana kampanye kebangsaan. Sinergi antara ketiganya akan memperkuat fondasi integrasi nasional dalam menghadapi tantangan era global dan multikultural.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Integrasi nasional merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Di era modern yang penuh tantangan, seperti konflik sosial berbasis SARA, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, ketimpangan pembangunan, serta munculnya gerakan separatis dan radikal, peran aktif pemerintah sangat diperlukan. Melalui berbagai kebijakan strategis seperti penguatan pendidikan karakter, literasi digital, pemerataan pembangunan, dan pendekatan dialogis, pemerintah berupaya menciptakan rasa keadilan, solidaritas, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media digital secara positif juga menjadi kunci dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan berbasis digital, kampanye nasionalisme di media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat dan influencer

dalam menyuarakan pesan-pesan persatuan merupakan langkah yang relevan di era globalisasi. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat, integrasi nasional dapat terus dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan demi terciptanya bangsa yang harmonis, inklusif, dan tahan terhadap ancaman perpecahan.

REFERENSI | REFERENCE

- Agus, A. A. (2016). Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Negara Republik Indonesia. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan*. Retrieved from <https://waqafilmunusantara.com>
- Akhyar, M., Zakir, S., Ilmi, D., & Febriani, S. (2024). Memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman Indonesia. *Inspirasi Dunia*, 3(3), 206. Retrieved from <https://journal.unimar-amni.ac.id>
- Alpata, A. R., Rahmadan, & Zainuri, H. (2024). Inovasi Kurikulum PAI: Integrasi antara Kurikulum Nasional dan Pendidikan Islam di Era Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 454–464.
- Ardiansyah, Zaennurain, K., Azril, NA, Siltania, MD, Ifansah, BT, Cantika, BA, Rizki, D., & Kurniawansyah, E. (2025). Strategi Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Gen Z 2024:(Studi Kasus Pada KPU Kota Mataram). *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9 (1).
- Asyahidah, N. L., & Dewi, D. A. (2022). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme pada Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9901–9908.
- Fadhilah, R. A. Z., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Nasionalisme Generasi Muda (Pemuda Pemudi Ujungberung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 159–169.
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2021). Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 43-51.
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (n.d.). *Konflik dan kolaborasi: Peran negara dalam integrasi bangsa*. Retrieved from <https://eprints2.ipdn.ac.id>
- Irhandayaningsih, A. (2012). *Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global*. HUMANIKA, 16(9).
- Makruf, M., Firmansyah, M. Z., & Nelwati, S. (2024). Memperkuat Integrasi Nasional Melalui Generasi Bangsa dan Teknologi Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 3(2), 158–161. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1528>
- Putri, A. A., Ridha, A. F., & Ananda, Z. A. (2023). Integrasi nasional sebagai upaya menghadapi tantangan dalam keberagaman. *Jurnal Indigenous*. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id>
- Sakhi, R. G., & Najicha, F. U. (2023). Memperkuat Integrasi Nasional dengan Memanfaatkan Generasi Muda dan Teknologi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 15(Special-1), 529–537. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Santoso, R. R., & Soesanto, E. (2024). Integrasi Teknologi Informasi dengan Nilai-Nilai Pancasila pada Era Multikulturalisme. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 27–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11388129>
- Suheri, A., Mantili, M., Rosmawiah, & Albert. (2022). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Nasionalisme dan Integrasi Bangsa di Era Modern*. Prosiding Seminar Nasional #Jilid 1 Universitas PGRI Palangka Raya, 327–340.
- Thulhidjah, M. (2022). Perilaku Penyebaran Berita Hoax dan Hate Speech pada Kalangan

- Mahasiswa Di Instagram. *Publistik: Riset Jurnalistik dan Media Komunikasi*, 1(2), 1–15.
- Universitas Lampung. (n.d.). *Buku ajar integrasi nasional*. Retrieved from <https://repository.lppm.unila.ac.id>.
- Yani, C. (2020). Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 15–21